



RAPAT KOORDINASI SINKRONISASI & HARMONISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TA 2017

Surabaya, 28 September 2016



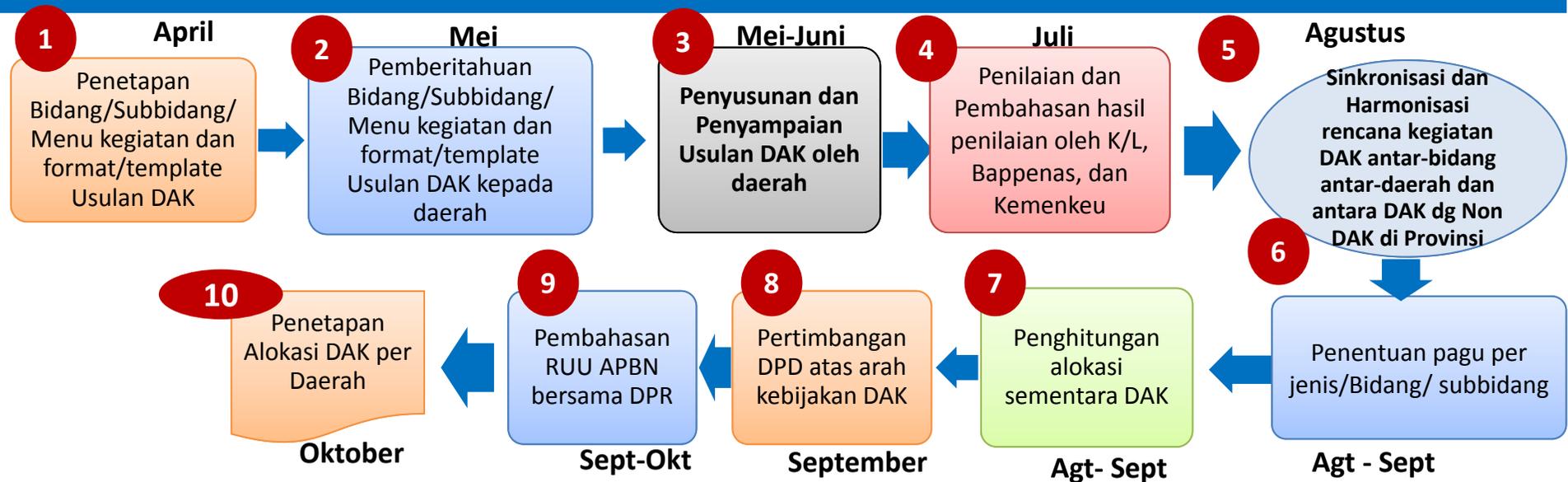


KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2017



1. Mempertajam fokus bidang/sub bidang DAK Fisik untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan.
2. Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan usulan daerah (*proposal based*) dan prioritas nasional dengan memperhatikan perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi.
3. Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
4. Melakukan sinkronisasi pengalokasian DAK , yaitu:
 - antar bidang/subbidang DAK
 - antarkabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan provinsi.
 - antara DAK dengan pendanaan lainnya selain DAK.dengan mengoptimalkan peran Provinsi dalam pelaksanaan sinkronisasi tersebut.
5. Memberikan diskresi kepada daerah untuk menggunakan maksimal 5% dari pagu DAK Fisik untuk kegiatan penunjang yang bersifat nonfisik.
6. Menghilangkan kewajiban Daerah untuk menyediakan dana pendamping.
7. Mempercepat penetapan Juknis/Juklak DAK, penetapan juknis dengan Perpres, dan berlaku 3 tahun untuk memberi kepastian bagi daerah.
8. Memperbaiki penyaluran DAK Fisik berbasis kinerja penyerapan.

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK PROPOSAL BASED TAHUN 2017



PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT

K/L Teknis	Bappenas	Kementerian Keuangan
<p>Menilai usulan target output kegiatan mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> data teknis kegiatan pada Data Pendukung Usulan DAK; perbandingan data teknis kegiatan yang diusulkan daerah dengan data teknis yang dimiliki oleh K/L; tingkat pencapaian SPM pada subbidang/bidang yang terkait; target output dan outcome yang akan dicapai oleh daerah dalam jangka menengah; target output dan outcome yang akan dicapai pada bidang/subbidang terkait per tahun secara nasional; Target output dan outcome terkait kegiatan yang akan didanai dari dana TP dan KP; dan Sinkronisasi kegiatan per bidang yang menjadi prioritas nasional. 	<p>Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data teknis kegiatan pada Data Pendukung Usulan DAK; lokasi prioritas per bidang/subbidang per tahun secara nasional; lokasi prioritas per bidang/subbidang dalam jangka menengah secara nasional; Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN. 	<p>Menilai satuan biaya setiap usulan kegiatan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Biaya Masukan; Standar Biaya Keluaran usulan K/L; Indeks kemahalan konstruksi. kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.



KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN 2017: Penajaman Bidang dan subbidang DAK Fisik



2016

DAK Reguler (Prov/Kab/Kota)

Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik yang merupakan kewenangan daerah.

- | | |
|---|--|
| 1. Pendidikan | 7. Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2. Kesehatan dan KB | 8. Transportasi |
| 3. Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum, Sanitasi | 9. Sarana Perdagangan, Industri Kecil & Menengah, & Pariwisata |
| 4. Kedaulatan Pangan | 10. Prasarana Pemda |
| 5. Energi Skala Kecil | |
| 6. Kelautan dan Perikanan | |

DAK Infrastruktur Publik Daerah

Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik di daerah yang belum di danai dari DAK Reguler.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Jalan & Jembatan | dan Sanitasi |
| 2. Irigasi | 4. Perhubungan |
| 3. Perumahan, Air Minum | 5. Kelautan dan Perikanan |

DAK Afirmasi (Kab/Kota)

Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. Air Minum; | 4. Jalan |
| 2. Sanitasi | 5. Transportasi perdesaan. |
| 3. Irigasi | |

2017

DAK Reguler (Prov/Kab/Kota)

Untuk membantu pemenuhan SPM dalam pelayanan publik dan mendukung kegiatan perekonomian daerah.

- | | |
|---|--|
| 1. Pendidikan (SD, SMP, SMA); | 4. Pertanian; |
| 2. Kesehatan (RS Rujukan Lokal) dan KB; | 5. Kelautan dan Perikanan; |
| 3. Perumahan dan Permukiman; | 6. Sentra Industri Kecil dan Menengah; dan |
| | 7. Pariwisata |

DAK Penugasan (Prov/Kab/Kota)

- Untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dalam RKP
- menu dan lokus terbatas.

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Pendidikan (SMK); | 5. Jalan; |
| 2. Kesehatan (RS Rujukan Regional); | 6. Pasar; |
| 3. Air Minum; | 7. Irigasi; dan |
| 4. Sanitasi; | 8. Energi Skala Kecil. |

DAK Afirmasi (Kab/Kota)

Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan **transmigrasi**

- | |
|--|
| 1. Perumahan dan Permukiman; |
| 2. Transportasi (transportasi desa, dermaga kecil, dan tambatan perahu); dan |
| 3. Kesehatan (Puskesmas). |



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK REGULER (1)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
A. DAK Reguler					Rp20.496,2
1	Pendidikan (UIC: Kemendikbud)				Rp6.107,1
	a. SD	Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimum (SPM), ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas.	<ol style="list-style-type: none">1. Rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotannya;2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya3. Koleksi perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik)	Kab/Kota yang kekurangan ruang kelas baru dan memerlukan perbaikan ruang belajar	Rp2.748,2
	b. SMP		<ol style="list-style-type: none">1. Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya yang mengalami rusak minimal sedang beserta perabotannya2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya3. Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya4. Pengadaan peralatan pendidikan dan media pembelajar		Provinsi yang kekurangan ruang kelas baru dan memerlukan perbaikan ruang belajar
	c. SMA				



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK REGULER (2)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
2	Kesehatan				Rp10.021,8
	a. Pelayanan Kesehatan Dasar (UIC: Kemenkes)	1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kefarmasian, pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan peningkatan kegiatan promotif preventif dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat, terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat 2. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Pembangunan dan renovasi puskesmas termasuk rumah dinas tenaga kesehatan dan puskesmas pembantu 2. Penyediaan alat kesehatan di puskesmas 3. Pengadaan puskesmas keliling termasuk Pusling perairan 4. Penyediaan sarana penunjang Puskesmas dan Pustu 5. Penyediaan alat, mesin dan bahan untuk pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan serta informasi kesehatan	Daerah yang memerlukan pembangunan dan perbaikan Puskesmas berikut peralatannya	Rp2.897,5
	b. Pelayanan Kesehatan Rujukan (UIC: Kemenkes)		1. Pembangunan dan renovasi gedung sarana RS Rujukan Nasional/ Provinsi/ Regional 2. Pembangunan dan renovasi gedung sarana RS Kabupaten/Kota 3. Penyediaan alat kesehatan di Rumah Sakit 4. Penyediaan prasarana RS	Daerah yang memiliki RS Rujukan, yang memerlukan pembangunan dan perbaikan RS berikut peralatannya	Rp4.615,2
	c. Pelayanan Kesehatan Kefarmasian (UIC: Kemenkes)		1. Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota 2. Pembangunan Baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi di Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi di Provinsi/Kabupaten/Kota	Sesuai kebutuhan obat per daerah dan pembangunan dan perbaikan instalasi farmasi berikut peralatannya	Rp2.008,1
	d. Pelayanan Keluarga Berencana (UIC: BKKBN)		1. Pengadaan sarana pelayanan KB 2. Pembangunan/alih fungsi balai penyuluhan KB dan gudang alat dan obat kontrasepsi 3. Pengadaan sarana transportasi pelayanan dan penyuluhan KB 4. Pengadaan media penyuluhan KB 5. Pengadaan sarana kerja petugas lapangan KB (PKB/PLKB, PPKBD/Sub PPKBD)	Kab/Kota yang kekurangan peralatan dan sarana kerja	Rp501,1



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK REGULER (3)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
3	Perumahan dan Permukiman (UIC: Kemen PUPERA)	Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman, meliputi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau guna meningkatkan standar hidup.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan rumah baru2. Peningkatan kualitas rumah swadaya bagi MBR	Kab/Kota yang memerlukan prasarana permukiman layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Rp654,8 mi
4	Pertanian (UIC: Kementan)	Mendukung peningkatan produksi padi dan tanaman pangan lain dalam rangka mendukung pencapaian target dan prioritas di bidang kedaulatan pangan dan agroindustri.	<p>Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan/perbaikan UPTD/Balai Diklat Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya2. Pembangunan/perbaikan SMK Pertanian Pembangunan dan penyediaan sarana pendukungnya3. Pembangunan/perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan penyediaan sarana pendukungnya <p>Kab/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan/perbaikan jalan pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)2. Pembangunan/perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyuluhan3. Pembangunan/perbaikan UPTD/Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan serta Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, dan penyediaan sarana pendukungnya4. Pembangunan/ perbaikan sumber-sumber air (kegiatan wajib) meliputi Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/ embung/ dam parit/ pintu air/ long storage	Daerah yang merupakan daerah ketahanan pangan	Rp1.750,0



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK REGULER (4)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
5	Kelautan dan Perikanan (UIC: Kementan)	Meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya, serta konservasi dan penyuluhan, dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.	Provinsi: 1. Pembangunan/rehabilitasi fasilitas pokok dan fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) 2. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok Balai Benih Ikan Sentral/BBIS (UPTD Provinsi) 3. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 4. Pengadaan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan konservasi perairan 5. Pengadaan sarana dan pembinaan mutu hasil perikanan Kabupaten/Kota: 1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (milik UPTD Kab/Kota) 2. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok Balai Benih Ikan Lokal/BBIL (milik UPTD Kab/Kota) 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat pesisir (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam)	Daerah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan konservasi perairan	Rp926,5
6	Industri Kecil dan Menengah (UIC: Kemenperin)	1. Mendukung penumbuhan populasi industri kecil dan menengah, dengan prioritas untuk wilayah di luar Pulau Jawa 2. Mendorong persebaran perwilayahan industri kecil dan menengah	1. Pembangunan fisik sentra industri kecil dan menengah 2. Revitalisasi fisik sentra industri kecil dan menengah	Kab/kota yang menjadi lokus prioritas pengembangan kawasan industri kecil dan menengah	Rp531,5



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK REGULER (5)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
7	Pariwisata (UIC: Kemenpar)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata	Penataan Kawasan Pariwisata: 1. Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya 2. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet 3. Penataan taman 4. Panggung kesenian/pertunjukan 5. Pembangunan dan/atau peningkatan/revitalisasi kawasan pariwisata: kios cinderamata, plaza pusat jajanan/kuliner, tempat ibadah 6. Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak, broadwalk dan pedestrian 7. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah Amenitas Pariwisata: 1. Pembangunan dermaga/jetty 2. Pembangunan titik labuh 3. Pembangunan dive center dan peralatannya 4. Pembangunan surfing center dan peralatannya	Kab/kota yang menjadi prioritas kawasan pariwisata dan memiliki potensi pariwisata	Rp504,4



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN (1)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
B. DAK Penugasan					Rp35.867,8
1	Pendidikan SMK (UIC: Kemendikbud)	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya ruang praktik siswa (RPS);2. Tersedianya peralatan Utama/Peralatan Praktek Produksi	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS), beserta perabotnya (2. Sarana Pendidikan berupa peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi	<ol style="list-style-type: none">1. 5 Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Industri Provinsi/Kab/Kota2. 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional & Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kab/Kota3. 20 Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)4. Provinsi dalam kawasan sentra utama Kedaulatan Pangan	Rp1.952 ,8
2	Kesehatan (UIC: Kemenkes)	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan sarana prasarana dan alat yang sesuai standar di RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional2. 700 kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi nasional3. 287 Kab/Kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional4. 1400 Puskesmas yang memenuhi SPA standar5. Pembangunan 23 RS Pratama.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Rujukan<ol style="list-style-type: none">a. Penyediaan sarana alkesb. Renovasi Penyediaan alat kesehatan dan Sarana prasarana di RS rujukan nasional, provinsi dan regional2. Pelayanan Dasar<ol style="list-style-type: none">a. Renovasi, penyediaan sarana prasarana dan alkes di Puskesmas wilayah perbatasanb. Pembangunan RS Pratama	<ol style="list-style-type: none">1. 4 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan Provinsi dan 110 RS Rujukan Regional2. 23 RS Pratama3. 124 Puskesmas di kawasan perbatasan	Rp4.831 ,3



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN (2)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
3	Air Minum (UIC: Kemen PUPERA)	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 444.726 rumah tangga bagi masyarakat (bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Non-MBR) di kab/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun.2. Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 716.352 rumah tangga melalui pembangunan baru 448 SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik termasuk tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 243.170 rumah tangga melalui peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP terlindungi.	<ol style="list-style-type: none">1. Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)2. Pembangunan SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik termasuk peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP terlindungi	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten/Kota pemilik akses layanan air minum <70,97% (di bawah rata-rata nasional)2. Kabupaten/Kota pemilik sisa kapasitas untuk perluasan dan peningkatan SR melalui jaringan perpipaan dan BJP3. 10 Kawasan Pariwisata Nasional & dan Kawasan Pariwisata Provinsi/Kab/Kota4. 9 KEK dan 14 Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Industri Provinsi/Kab/Kota5. 122 Daerah Tertinggal6. 150 lokpri di 41 Kabupaten Perbatasan Negara7. 95 Daerah Kepulauan	Rp.1.500,3



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN (3)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
4	Sanitasi (UIC: Kemen PUPERA)	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 444.726 rumah tangga bagi masyarakat (bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Non-MBR) di kab/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun.2. Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 716.352 rumah tangga melalui pembangunan baru 448 SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik termasuk tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 243.170 rumah tangga melalui peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP terlindungi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan SPAL terpusat2. Pembangunan SPAL setempat3. Pembangunan TPS 3R berserta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal.	<ol style="list-style-type: none">1. Kab/Kota yang akses layanan sanitasi <62,14%2. Kab/Kota yang masuk daftar minat PPS dan/atau yang telah mempunyai atau sedang dalam proses penyusunan strategi sanitasi Kab/Kota (SSK)/ Memorandum Program Sanitasi (MPS)3. 15 Kab/Kota yang telah memiliki IPAL Skala Kota4. 110 Kab/Kota yang telah memiliki IPAL Skala Kawasan dan Kab/Kota yang telah memiliki IPAL Skala Komunal.5. Kab/kota yang mempunyai kawasan/kluster permukiman dengan kepadatan >100 jiwa/Ha dan 93 kab/kota di 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas6. 58 Kab/Kota yang telah didampingi untuk penerapan sistem LLTT7. Kab/Kota yang telah memiliki desa yang sudah ODF minimal 2 tahun8. 700 lokasi yang tersebar di 67 Kab/Kota di 15 DAS Prioritas dan Kab/Kota yang telah mengusulkan kegiatan tersebut dalam SSK.9. Pengadaan dan pembangunan alat pemantauan air sungai otomatis di 20 Provinsi di 15 DAS Prioritas.	Rp.1.500,2



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN (4)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
5	Jalan (UIC: Kemen PUPERA)	<ol style="list-style-type: none">1. Tercapainya kondisi Jalan Provinsi Mantap : 71,75% dan Jalan Kab/Kota Mantap: 60,76%2. Meningkatnya aksesibilitas menuju kawasan-kawasan strategis nasional termasuk kawasan perbatasan, kawasan pariwisata dan kawasan industri, serta daerah tertinggal dan terwujudnya konektivitas nasional melalui pengembangan jaringan jalan provinsi, Kab/Kota dan Jalan strategis daerah (non status	<ol style="list-style-type: none">1. Rehabilitasi, Peningkatan; dan2. Pembangunan Jalan	<ol style="list-style-type: none">a. 33 Provinsi dengan prioritas pada 17 provinsi yg belum mencapai target jalan mantap 75%b. 508 Kabupaten/Kota dengan prioritas pada 245 kab/kota yg belum mencapai target jalan mantap 65%c. Kabupaten/provinsi yang mengusulkan konektivitas pada forum Musrenbangnas yang diprioritaskan pada 21 Provinsi;d. 122 Daerah Tertinggal, dengan memperhatikan ketersediaan pagu alokasi, sehingga apabila alokasi tidak mencukupi maka akan difokuskan pada 88 Daerah Tertinggal (Target Daerah diantaskan pada tahun 2019);e. 10 Kawasan Pariwisata Nasional + 1, dengan memperhatikan ketersediaan pagu alokasi, sehingga apabila alokasi tidak mencukupi maka akan difokuskan pada 2 destinasi yang paling siap (Tanjung Kelayang dan Danau Toba)f. 14 Kawasan Industri (diprioritaskan di 6 kawasan industri) dan 9 KEK (termasuk kawasan industri dan destinasi prioritas nasional);g. 85 Kawasan Transmigrasi yang tersebar di 44 daerah tertinggal dan 4 daerah transmigrasi di daerah perbatasan, serta 150 Lokpri di 41 Kab/Kota Perbatasan Negara;h. Mendukung pengembangan 6 Kota Baru yang paling siap (dari target 10 Kota Baru dalam RPJMN 2015-2019);i. Mendukung aksesibilitas di daerah yang memiliki tingkat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) rendah.	Rp.20.540,1



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN (5)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
6	Pasar (UIC: Kemendag)	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan2. Peningkatan sarana perdagangan pendukung perlindungan konsumen3. Pengembangan sarana pelayanan tera/tera ulang dan sarana penunjang pasar tertib ukur sebanyak 150 Unit serta pembangunan UPTD Metrologi Legal sebanyak 50 unit.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat2. Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Pasca Bencana yang mengalami kerusakan, terutama pasca kebakaran dan bencana alam;3. Peningkatan kapasitas Gudang SRG yang telah beroperasi dengan tingkat utilisasi yang tinggi dan melebihi kapasitas tampung, serta penyediaan fasilitas pendukung4. Pembangunan Gudang Non SRG pada daerah-daerah yang relatif kesulitan memperoleh bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama diakibatkan oleh faktor gangguan iklim	<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi pasar rakyat reguler dan diprioritaskan pasca bencana;2. Lokasi Pasar Tertib Ukur/Metrologi Legal;3. Lokasi Prioritas pembangunan Sistem Resi Gudang (SRG)	Rp.1.036 ,7



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN (6)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
7	Irigasi (UIC: Kemen PUPERA)	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Daerah Irigasi Baru di 81 DI seluas 5.000 Ha2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi di 5.394 DI seluas 755.200 Ha3. Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi di 15 DAS Prioritas	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan jaringan irigasi2. Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa3. Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi4. Pembangunan DAM Pengendali dan Gully Plug	<ol style="list-style-type: none">a. Permen PUPR No. 14/2015 (29 provinsi dan 429 Kab/Kota);b. Difokuskan kepada 14 provinsi yang memiliki produksi padi >1 juta ton/tahun berdasarkan ATAP 2015 BPS;c. Difokuskan kepada 153 Kab/Kota sentra produksi beras yang memiliki produksi padi di atas rata-rata;d. 50 kabupaten (29 kab diantaranya termasuk sentra produksi beras) yang ditetapkan sebagai Pengembangan Kawasan Komoditas Padi 2015-2019;e. Untuk kegiatan pembangunan, lebih difokuskan Provinsi dan Kabupaten yang memiliki Daerah Irigasi kewenangan yang dilayani oleh Bendungan antara lain:f. Provinsi Jawa Timur yang memanfaatkan Bendungan Bajulmati;g. Kabupaten Pidie, Aceh yang memanfaatkan Bendungan Rajui dan Kabupaten Sampang, Jawa Timur yang memanfaatkan Bendungan Nipah.	Rp.4.005,1



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN (7)



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
8	Energi Skala Kecil (UIC: Kemen ESDM)	Peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 92,75% di tahun 2017 dan 96,6% di tahun 2019 melalui energi baru terbarukan yang berada di Daerah Tertinggal, Lokasi Prioritas di Kabupaten Perbatasan Negara, Daerah Kepulauan dan Daerah Transmigrasi. Target untuk tahun 2017 akan ditentukan pada pertemuan tiga pihak selanjutnya, usulan indikatif sementara adalah PLTMH 1,6 MW, PLTS 9,9 MWp dan Biogas 9330 m ³ .	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan PLTMH2. Pembangunan PLTS3. Pembangunan Biogas	Daerah-daerah yang belum akan dibangun jaringan listrik PLN selama 3-5 tahun ke depan (off-grid), khususnya: Daerah Tertinggal, Lokasi Prioritas di Kabupaten Perbatasan Negara, Daerah Kepulauan dan Daerah Transmigrasi.	Rp.502,3



RUANG LINGKUP BIDANG, MENU KEGIATAN, SASARAN, DAERAH PENERIMA DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK AFIRMASI



No	Bidang	Sasaran dan Target	Menu Kegiatan	Lokasi Prioritas	Pagu (miliar)
C. DAK Afirmasi					Rp3.479,2
1	Perumahan dan Permukiman (UIC: Kemen PUPERA)	Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman, meliputi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau guna meningkatkan standar hidup, khususnya di wilayah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan rumah baru2. Peningkatan kualitas rumah swadaya bagi MBR	Kab/Kota dengan kriteria daerah afirmasi yang memerlukan prasarana permukiman layak huni bagi MBR di wilayah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi.	Rp383,3
2	Transportasi (UIC: Kemendes PDTT)	Meningkatkan konektivitas wilayah, khususnya wilayah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Transportasi Darat2. Transportasi Air3. Dermaga Rakyat4. Tambatan Perahu	Kab/Kota yang termasuk wilayah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi	Rp844,1
3	Kesehatan (UIC: Kemenkes)	Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan 124 Puskesmas Perbatasan; dan Puskesmas terpencil/Kepulauan (termasuk peralatan, sarana prasarana, dan Puskesmas keliling)2. Pembangunan 124 Puskesmas Perbatasan; dan Puskesmas Terpencil/Kepulauan (termasuk peralatan, sarana prasarana, dan Puskesmas Keliling)	Kab/Kota yang termasuk wilayah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi	Rp2.251,8



PERKEMBANGAN DAK FISIK



- Pengertian:**

DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- Tujuan:**

1. membantu daerah tertentu dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik;
2. mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional; dan
3. mengatasi ketimpangan pelayanan publik antar daerah dalam mencapai SPM.

- Perkembangan Alokasi DAK Fisik:**

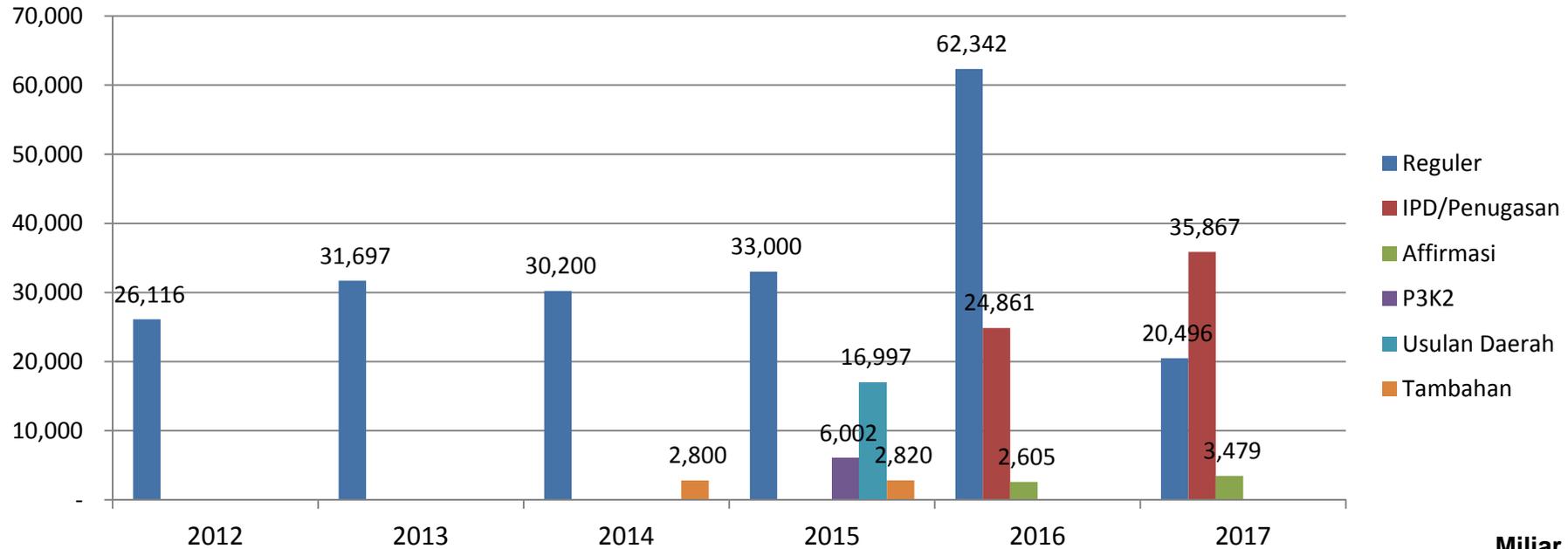
Tahun	Pagu (triliun Rp)		Jenis	Jumlah Bidang	Jumlah Daerah			Peng-alokasian	
					Penerima	Tidak Menerima	Total		
2013	31,7	30,7	1. DAK Reguler	12	518	6	524	<i>Formula Based</i>	
		1,0	2. DAK Afirmasi	1	183	341	524		
2014	33,0	30,2	1. DAK Reguler	12	528	11	539		
		2,8	2. DAK Afirmasi	3	183	356	539		
2015	58,8	33,0	1. DAK Reguler	10	529	13	542		
		2,8	2. DAK Afirmasi	3	196	346	542		
		6,0	3. DAK P3K2	4	259	283	542		
		17,0	4. DAK Usulan Daerah	4	214	328	542		
2016	89,8	62,3	1. DAK Reguler	10	541	1	542		<i>Proposal Based</i>
		24,9	2. DAK IPD	5	508	34	542		
		2,6	3. DAK Afirmasi	3	178	364	542		
2017	59,8	20,5	1. DAK Reguler	7			542		
		35,8	2. DAK Penugasan	8					
		3,5	3. DAK Afirmasi	3					



PERKEMBANGAN PAGU DAK FISIK TAHUN 2012-2017



Miliar Rp



Miliar Rp

JENIS DAK	2012	2013	2014	2015	2016	2017
REGULER	26.116	31.697	30.200	33.000	62.342	20.496
IPD/PENUGASAN					24.861	35.867
AFFIRMASI					2.605	3479
P3K2				6.002		
USULAN DAERAH				16.997		
TAMBAHAN			2.800	2.820		
TOTAL	26.116	31.697	33.000	58.819	89.808	59.842



KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN 2017: Prinsip-prinsip Pengalokasian DAK Fisik



Usulan kegiatan harus:

1. Menjadi kewenangan daerah;
2. Bagian dari RPJMD dan RKPD yang telah disinkronisasi dengan prioritas nasional; dan
3. Kegiatannya harus menghasilkan output/ outcome yang bermanfaat langsung bagi masyarakat

**Prinsip
Pembangunan
Berkelanjutan**

**Prinsip
Percepatan
Penyediaan
Infrastruktur
di Daerah**

Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang terkait dengan:

1. pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM;
2. pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya

Usulan kegiatan harus disinkronisasikan antara:

1. Bidang yang satu dengan bidang lainnya;
2. Daerah yang satu dengan daerah lainnya, termasuk antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan
3. Kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK

**Prinsip
Sinkronisasi
Pendanaan
Pembangunan
Daerah**

**Prinsip
Pengalokasian
DAK Berbasis
Kinerja
Penyerapan**

Pengalokasian DAK memperhitungkan tingkat penyerapan DAK tahun sebelumnya, dengan tujuan agar:

1. Daerah punya komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diusulkan;
2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan target output dan lokasi kegiatan serta batas waktu yang ditetapkan.



• **Terima Kasih**